

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

Latar belakang sejarah Irak telah menunjukkan bahwa sengketa antara Irak dan Kuwait telah ada sejak lama. Pada jaman Kesultanan Ottoman, Kuwait adalah bagian dari Basrah yang merupakan salah satu propinsi Irak dibawah kekuasaan Sultan Ottoman. Oleh karena itu Irak bersikeras bahwa Kuwait tidak bisa dilepaskan dari Irak. Api perselisihan antara dua negara masih terus berlanjut dan puncak perselisihan antara kedua negara itu terjadi ketika Saddam Hussein menjadi Presiden Republik Irak. Irak yang mengalami kehancuran ekonomi dan infrastrukturnya sebagai akibat perang dengan Iran, membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk itu Irak meminta bantuan kepada Arab Saudi dan Kuwait, namun permintaan Irak itu ditolak. Irak menuduh Kuwait telah mencuri minyak Irak di ladang minyak Ratga dan Rumaillah, untuk itu Irak menuntut agar Kuwait memberikan ganti rugi dan kompensasi dari ladang minyaknya yang dicuri oleh Kuwait. Tuntutan Irak itu diikuti dengan ancaman kekerasan, namun tuntutan itupun ditolak oleh Kuwait. Kondisi ekonomi Irak dan penolakan Kuwait itulah yang menjadi salah satu pendorong invasi Irak terhadap Kuwait. Ambisi Saddam Hussein untuk menjadi Pemimpin Bangsa Arab juga mendorong terjadinya invasi Irak. Disamping itu untuk mempertahankan dan memelihara kepentingan nasional Irak, Saddam Hussein berupaya mencari cara untuk mempersatukan bangsanya. Cara yang ditempuhnya adalah melancarkan invasi militer terhadap Kuwait dalam upaya membangkitkan rasa nasionalisme serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsanya. Kombinasi latar belakang sejarah, latar belakang ekonomi, ambisi Saddam Hussein dan kepentingan nasional Irak itulah yang merupakan faktor-faktor pendorong terjadinya invasi Irak terhadap Kuwait.

Reaksi keras dunia internasional dan PBB terhadap invasi Irak merupakan wujud nyata dari keinginan bersama untuk menciptakan keamanan dan perdamaian internasional sesuai dengan Piagam PBB. Irak telah melanggar peraturan dan ketentuan Piagam PBB, oleh karena itulah PBB dan sebagian besar anggotanya yang memiliki komitmen kuat terhadap keamanan dan perdamaian internasional mengecam keras tindakan invasi Irak. PBB sebagai penanggungjawab keamanan dan perdamaian internasional melakukan segala upaya untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Dewan Keamanan PBB dengan dukungan Amerika Serikat mengeluarkan

resolusi-resolusi damai untuk menekan Irak agar mau keluar dari Kuwait, namun Irak tidak mau mematuhi. Upaya internasional yang dilakukan oleh negara-negara Arab terus dilakukan agar Irak mau mundur dari Kuwait tanpa syarat, namun Irak tetap pada pendiriannya. Para pemimpin dunia dan tokoh-tokoh internasional juga berupaya mempengaruhi Saddam Hussein agar mau mundur dari Kuwait namun usaha itu pun gagal. Akibatnya diplomasi internasional dan upaya perdamaian PBB mengalami jalan buntu. Oleh karena itulah Dewan Keamanan PBB dengan dukungan dari Amerika Serikat mengeluarkan Resolusi 678 yang memberikan mandat kepada Amerika Serikat untuk menggunakan kekuatan militer dalam rangka mengusir Irak dari Kuwait. Fakta ini menunjukkan bahwa telah terjadi kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam proses pengambilan keputusan untuk mengeluarkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dalam rangka menyelesaikan invasi Irak terhadap Kuwait.

Invasi Irak terhadap Kuwait merupakan ancaman langsung terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah, baik kepentingan terhadap minyak, Israel maupun stabilitas kawasan Timur Tengah. Itulah sebabnya ketika Irak melakukan invasi terhadap Kuwait, Amerika Serikat melakukan segala upaya untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah diplomasi dengan cara-cara damai dan ancaman kekerasan. Diplomasi dengan cara-cara damai dilakukan melalui jalur-jalur diplomasi dengan menggunakan forum bilateral maupun multilateral. Dalam forum Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat melakukan upaya diplomasi, tekanan, bujukan dan bahkan sogokan kepada anggota tetap maupun anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB agar dapat menyetujui dikeluarkannya resolusi yang dapat memberikan mandat penggunaan kekuatan militer terhadap Irak. Amerika Serikat dengan dukungan Dewan Keamanan PBB akhirnya dapat memperoleh mandat yang dinginkannya berupa Resolusi 678. Dengan mandat Dewan Keamanan PBB itulah Amerika Serikat dapat melancarkan Operasi Badai Gurun yang dapat mengusir Irak dari Kuwait. Semua upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait menunjukkan adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat.

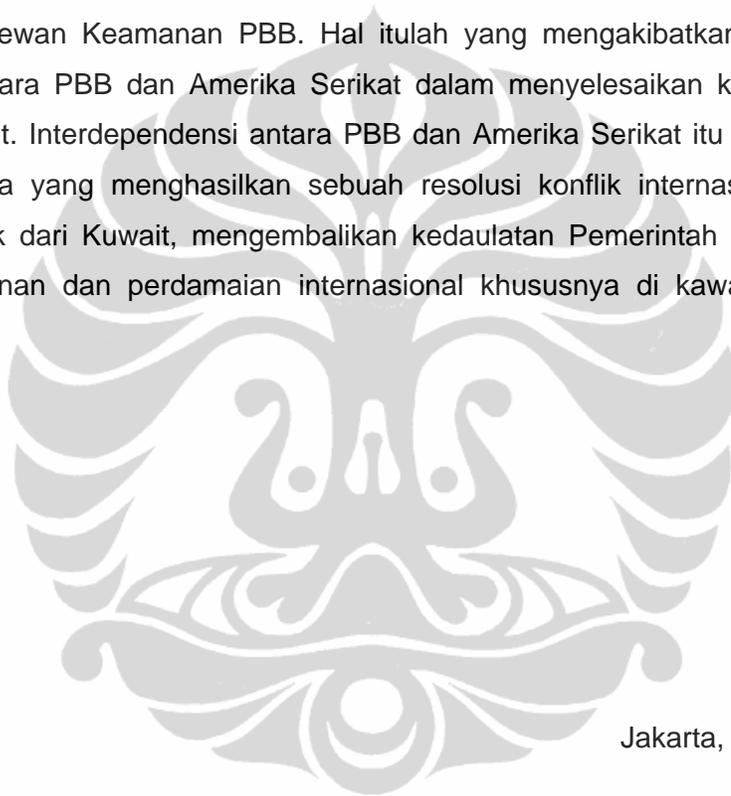
Teori keamanan kolektif telah membuktikan bahwa dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait ternyata semua negara anggota PBB mengakui pentingnya *status quo* dan berupaya untuk menghentikan penggunaan kekuatan militer untuk tujuan lain selain untuk pertahanan negaranya sendiri. Sebagian besar negara di dunia yang disponsori oleh PBB dan Amerika Serikat menentang tindakan invasi Irak terhadap

Kuwait. Negara-negara besar terutama negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki Hak Veto memiliki komitmen kuat bahwa penggunaan kekuatan militer dan keuangannya tidak digunakan untuk membantu, mendorong atau melakukan agresi walaupun hal itu berkaitan langsung terhadap kepentingan nasionalnya. Sebagian besar anggota PBB secara aktif melakukan tindakan keamanan kolektif untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Demikian juga Operasi Badai Gurun yang dilancarkan oleh Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat merupakan wujud dari tindakan keamanan kolektif dalam upaya memulihkan keamanan dan perdamaian internasional khususnya di kawasan Timur Tengah. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa keamanan kolektif dapat berjalan dengan baik dan dilakukan dengan komitmen yang kuat dari para anggotanya. Tindakan keamanan kolektif dalam upaya mengusir Irak dari Kuwait telah mendorong adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat.

Analisis tentang elemen-elemen kolaborasi telah membuktikan adanya kolaborasi antara PBB dan Amerika Serikat yang mendorong terjadinya kerjasama antara kedua aktor itu. Domain yang sama telah mendorong PBB dan Amerika Serikat untuk melakukan kolaborasi. Kedudukan dan posisi yang seimbang antara PBB dan Amerika Serikat memudahkan terjadinya kolaborasi. PBB maupun Amerika Serikat dapat berkolaborasi, karena media kolaborasinya sama, yaitu kawasan Timur Tengah. Adanya kejelasan insentif kolaborasi mendorong terjadinya kolaborasi antara PBB dan Amerika Serikat. Agar kolaborasi dapat dilaksanakan, maka kontribusi semua pihak harus seimbang. Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan Amerika Serikat. Demikian juga Amerika Serikat tidak dapat menggunakan kekuatannya terhadap Irak tanpa mandat dari PBB. Oleh karena itu tidak pilihan lain bagi kedua institusi itu kecuali melakukan kolaborasi dan hal itu mendorong terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Hasil dari kolaborasi dan kerjasama itulah yang menghasilkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk Resolusi 678 yang memberikan mandat kepada Amerika Serikat dengan Pasukan Koalisinya untuk melancarkan operasi militer yang dapat mengusir Irak dari Kuwait.

Interdependensi antara PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait disebabkan oleh salah satu pihak tidak dapat bekerja sendiri-sendiri tanpa dukungan pihak lain, karena ada ketentuan dan peraturan internasional yang harus ditaati oleh kedua belah pihak, yaitu Piagam PBB.

Interdependensi membutuhkan kesepakatan dan untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian kasus invasi Irak, Amerika Serikat memerlukan dukungan PBB dan demikian juga PBB memerlukan dukungan Amerika Serikat. Sensitifitas dan kerawanan PBB dan Amerika Serikat yang ditimbulkan oleh invasi Irak terhadap Kuwait mengakibatkan terjadinya interdependensi antara PBB dan Amerika Serikat. PBB tidak dapat mengeluarkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dan melaksanakannya tanpa mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Demikian juga Amerika Serikat tidak dapat bertindak sendiri untuk melancarkan operasi militer terhadap Irak tanpa dukungan dan mandat dari Dewan Keamanan PBB. Hal itulah yang mengakibatkan terjadinya interdependensi antara PBB dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Interdependensi antara PBB dan Amerika Serikat itu mendorong terjadinya kerjasama yang menghasilkan sebuah resolusi konflik internasional yaitu dapat mengusir Irak dari Kuwait, mengembalikan kedaulatan Pemerintah Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian internasional khususnya di kawasan Timur Tengah.



Jakarta, 8 Juli 2008